

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Menurut Lindblom (1994) mengungkapkan *legitimacy theory* adalah sebagai berikut:

Teori legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Dengan kata lain, teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi hanya dapat bertahan apabila masyarakat menerima bahwa organisasi tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sama dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat.

Selanjutnya menurut Wicaksono (2012) menyatakan bahwa teori legitimasi penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh dasar-dasar, norma-norma, nilai-nilai dan peraturan sosial yang membatasi perusahaan agar memperhatikan kepentingan sosial dan dampak dari reaksi sosial yang dapat ditimbulkan. Dengan melakukan pengungkapan sosial (kinerja lingkungan), perusahaan merasa keberadaan aktivitasnya terlegitimasi.

Sedangkan Deegan (2004) mengungkapkan bahwa: “Teori legitimasi perusahaan harus terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar dengan sah”.

Selanjutnya Chariri dan Ghozali (2007) berpendapat bahwa *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan, yaitu:

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berbuah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat.

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Freeman (2002) memberikan pengertian tentang teori *stakeholder* sebagai berikut:

Teori *stakeholder* memberikan gambaran bahwa tanggungjawab sosial perusahaan sewajarnya merupakan tindakan memaksimalkan laba, tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham namun untuk seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan perusahaan. Teori ini dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization* (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo, dan Raymond, 2005). Dengan demikian *stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Menurut Budimanta (2008) mengungkapkan *stakeholder theory* sebagai berikut:

Stakeholder Theory adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) teori *stakeholder* menyatakan bahwa: “Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut.”

Menurut Clarkson (1994), terdapat dua golongan *stakeholder* yaitu sebagai berikut:

Stakeholder sukarela dan *stakeholder* non-sukarela. *Stakeholder* sukarela adalah suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko karena mereka telah melakukan investasi di dalam suatu perusahaan. Sedangkan, *stakeholder* non-sukarela adalah suatu kelompok atau individu yang menghadapi risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut.

Dengan kata lain, *stakeholder* adalah pihak yang mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh keputusan dan strategi perusahaan.

Sementara Cohen, Webb, Nath, dan Wood (2009) merumuskan bahwa terdapat dua macam *stakeholder*, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer terdiri dari pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok, dan kelompok *stakeholder* publik. Sedangkan yang termasuk ke dalam *stakeholder* sekunder adalah media dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan cakupan yang lebih luas.

Berdasarkan asumsi beberapa *stakeholder theory*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan harus menjaga legitimasi *stakeholder* serta menerapkannya pada kerangka kebijakan dan

pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Nor Hadi, 2011).

2.2 Kinerja Lingkungan

2.2.1 Definisi Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 4 tahun 1982 mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Sementara itu menurut pasal 4 pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a) tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- c) terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d) terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang;
- e) terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

2.2.2 Definisi Kinerja Lingkungan

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode (Pangastuti, 2008:28).

Kinerja lingkungan diterjemahkan sebagai kinerja yang berkenaan dengan lingkungan, terutama berkaitan dengan dampak lingkungan. Kinerja ini berhubungan dengan tiga aspek, yaitu *strategic corporate environmental performance*, *operational corporate environmental performance*, dan *corporate environmental reporting* (Gunther, et al: 2011).

Adapun Ikhsan (2008:41) menjelaskan bahwa: “Kinerja lingkungan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan terkait langsung dengan lingkungan alam disekitarnya”.

Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan, dan target lingkungan (ISO 14001).

Menurut Lankoski (2000), konsep kinerja lingkungan merujuk pada tingkat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan lingkungan yang lebih rendah menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan lebih baik. Begitu pula sebaliknya,

semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungannya maka semakin buruk kinerja lingkungan perusahaan tersebut.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang berfokus pada kegiatan perusahaan dalam melestarikan lingkungan.

2.2.3 Tujuan Kinerja Lingkungan

Seluruh aktivitas operasi perusahaan berkaitan dengan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seluruh aktivitas ini dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Octina (2007): “Badan pengatur nasional dan internasional telah memberlakukan undang-undang yang lebih ketat, sementara organisasi lingkungan dan konsumen telah mengintensifkan pengawasan publik pada perilaku lingkungan bisnis”.

Beberapa aktivitas seperti mengurangi pembuangan, meningkatkan kualitas, menghemat energi daur ulang, dan menaati peraturan dan hukum pengendalian polusi sangatlah diperlukan, sehingga kinerja perusahaan terhadap lingkungan diharapkan bisa meningkat dan memberikan manfaat tidak hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk perusahaan itu sendiri dan masyarakat secara umum.

2.2.4 Indikator Kinerja Lingkungan

Menurut Purwanto (2000), terdapat jenis ukuran indikator kinerja lingkungan yang secara umum terdiri dari 2 golongan yaitu: “Indikator *lagging* dan Indikator *Leading*”.

1. Indikator *lagging* yaitu ukuran kinerja *end-process*, mengukur output hasil proses seperti jumlah polutan dikeluarkan.
2. Indikator *leading* yaitu ukuran kinerja *in-proses*.

Jenis indikator yang sudah banyak dikenal yaitu indikator *lagging*, seperti jumlah limbah yang dihasilkan, dll. Manfaat utama menggunakan indikator jenis ini adalah mudah digunakan dan dimengerti.

Tabel 2.1
Indikator *leading* dan *lagging* ukuran kinerja lingkungan

Tipe Indikator	Indikator Tertinggal (<i>lagging</i>)	Indikator Memimpin (<i>leading</i>)
Ukuran	Indikator <i>output/end-of-process</i>	Indikator <i>manajemen/in-process</i>
Fokus	Hasil (output)	Tingkat status aktifitas (input)
Pendekatan	Kuantitatif	Kuantitatif dan Kualitatif
Kekuatan	Mudah menjumlahkan dan dimengerti: umum disukai publik dan pemerintah	Merefleksikan tidak hanya kinerja masa lalu, namun sekarang, dan masa depan
Kelemahan	Kesenjangan waktu dalam lingkaran umpan balik, akar penyebab tidak teridentifikasi	Lebih sulit dihitung dan dievaluasi; sulit membangun dukungan penggunaan; tidak mengarah pada semua perhatian pemegang saham

Sumber: Ikhsan (2009:311)

Indikator kinerja lingkungan memadatkan data lingkungan yang luas ke dalam informasi kritis yang memungkinkan pemantauan, pencapaian sasaran,

peningkatan kinerja, tolak ukur dan pelaporan. Menurut Ikhsan (2009:309) perbandingan dari indikator kinerja lingkungan diantara perusahaan atau secara eksternal dengan perusahaan lain atau *competitor* disebut *benchmarking*, *benchmarking* menawarkan kemungkinan untuk mendeteksi petunjuk lemah dan mengidentifikasi kemungkinan potensial.

2.2.5 Pengukuran Kinerja Lingkungan

Menurut Ikhsan (2009): “Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak”. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian dan sasaran tujuan.

Kinerja lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu kinerja lingkungan kuantitatif dan kinerja lingkungan kualitatif. Kinerja lingkungan kuantitatif merupakan hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol aspek lingkungan fisiknya. Sedangkan kinerja lingkungan kualitatif dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset non fisik, seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami manusia pelaku kegiatan, dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran, dan targetnya (Tri P, 2006:9).

2.3 PROPER

Di Indonesia, kinerja lingkungan dapat diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang biasa disebut dengan PROPER. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energy, konservasi sumberdaya, dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pembangunan masyarakat (Laporan Hasil Penilaian PROPER, 2011:1).

Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrument disentif reputasi/citra bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrument ekonomi.

Selain itu, penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan PROPER saat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil PROPER dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan *stakeholder* lainnya. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan yaitu, emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Melalui pemeringkatan warna ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami segala aspek kinerja penataan masing-masing perusahaan. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa PROPER merupakan sistem pemeringkatan yang pertama kali menggunakan peringkat warna.

Tabel 2.2
Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat	Keterangan
Emas	Untuk usaha atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.
Hijau	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (<i>Reduce, Rescue, Recycle, dan Recorvery</i>), dan melakukan upaya tanggungjawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.
Biru	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
Hitam	Untuk usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran

	terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
--	---

Sumber: PROPER, 2013

2.3.1 Kriteria dan Prosedur Penilaian PROPER

Peringkat kinerja PROPER berorientasi kepada hasil yang telah dicapai perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang mencakupi 7 (tujuh) aspek yaitu:

1. Penaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran air;
2. Penaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran udara;
3. Penaatan terhadap peraturan pengelolaan Limbah B3;
4. Penaatan terhadap peraturan AMDAL;
5. Sistem Manajemen Lingkungan;
6. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya;
7. *Community Development, Participation, dan Relation.*

Perusahaan yang menjadi peserta dan ditangani efektif melalui instrument penataan PROPER, secara umum dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki dampak penting terhadap lingkungan
- b. Mempunyai dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang besar
- c. Perusahaan publik, terdaftar di pasar modal dalam dan luar negeri.
- d. Perusahaan yang berorientasi ekspor.

Sedangkan jenis industri yang menjadi peserta PROPER adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok pertambangan, Energi, dan Migas (PEM). Kelompok ini terdiri dari industri pertambangan (batubara, mineral, pengolahan mineral), energy (PLTP, PLTU, PLTD, PLTG), dan Migas (EP, UP, Distribusi, LNG, LPG)

- b. Kelompok agro industri, yang terdiri dari industri sawit, gula, karet, kayu lapis, rokok, susu, gula, makanan dan minuman, minyak, jamu, dan pengolahan makanan.
- c. Kelompok manufaktur dan jasa, yang terdiri atas industri kimia, farmasi, otomotif, *pulp dan paper*, keramik, elektronik, *consumer goods*, tekstil, kawasan industri, semen, hotel, rumah sakit, dan beberapa jenis industri lainnya.

Dasar penilaian dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*) yang sudah dicapai oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, dititikberatkan pada 4 (empat) area penilaian utama dengan metode sistem gugur, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Dasar Penilaian PROPER

No	Area Penilaian	Dasar Nilai
1	Pengendalian Pencemaran Air dan Laut	Baku Mutu Parameter Kunci
2	Pengendalian Pencemaran Udara	Baku Mutu per Parameter Kunci
3	Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3	Izin dan Progres Pengelolaan Terukur
4	Persyaratan AMDAL	Progres Penataan RKL / PKL

Sumber: www.menlh.go.id

Uraian aspek teknis dalam penilaian PROPER ditinjau pada beberapa aspek antara lain aspek pencemaran air, pencemaran udara, limbah B3, dan AMDAL. Untuk lebih memahami aspek teknis penilaian PROPER untuk tiap-tiap peringkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Aspek Teknis Penilaian PROPER

Hitam	
Aspek	Indikator
Pencemaran Air	1. Perusahaan tidak mempunyai IPAL (apabila diperlukan),

	2. Perusahaan tidak melakukan pengelolaan air limbah
Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan tidak mempunyai alat pengendalian pencemaran udara (apabila diperlukan). 2. Perusahaan tidak melakukan pengendalian pencemaran udara. 3. Emisi udara > 500% dari BME (izin).
Pengelolaan Limbah B3	Perusahaan tidak mengelola limbah B3 dan mempunyai dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
AMDAL/UKL/UPL	Perusahaan tidak mempunyai dokumen AMDAL atau RKL/RPL yang disetujui instansi yang berwenang.
MERAH	
Aspek	Indikator
Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan belum mempunyai izin pembuangan air limbah (apabila telah diwajibkan). 2. Perusahaan melakukan pengambilan contoh dan analisis air limbah kurang dari sekali per bulan. 3. Perusahaan belum melakukan pelaporan hasil pemantauan air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan (per 3 bulan) kepada instansi terkait. 4. Perusahaan belum mempunyai alat ukur debit atau alat ukur debit tidak berfungsi dengan baik. 5. Tidak dilakukan pengukuran debit harian. 6. Konsentrasi air limbah belum memenuhi BMAL atau persyaratan yang ditetapkan di dalam izin
Pencemaran Air Laut	Perusahaan belum mempunyai izin untuk pembuangan limbah ke laut (<i>dumping</i>).
Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stack</i> yang mengeluarkan emisi belum dilengkapi dengan tempat pengambilan sampel emisi udara dan peralatan pendukung lainnya. 2. <i>Stack</i> yang ada belum dilengkapi dengan alat pemantauan udara sebagaimana yang dipersyaratkan

	<p>(tergantung jenis industry).</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum dilakukan pengukuran emisi udara untuk semua <i>stack</i> sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan (harian atau setiap 6 bulan). Perusahaan tidak melaporkan hasil pemantauan emisi udara kepada instansi terkait sebagaimana mestinya. Emisi udara yang dihasilkan belum memenuhi Baku Mutu Emisi Udara sebagaimana yang dipersyaratkan.
Pengelolaan Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan belum mempunyai semua izin pengelolaan limbah B3 yang dilakukan untuk semua aspek sebagaimana yang dipersyaratkan. Perusahaan belum melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan. Penyimpanan limbah B3 belum dilakukan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam izin. Pengelolaan limbah B3 dilokasi (<i>on site incinerator</i>) belum dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Pengelolaan limbah B3 di lokasi (<i>on site landfill</i>) belum dikelola dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam izin.
AMDAL/UKL/UPL	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan belum melakukan persyaratan di dalam dalam AMDAL dan RKL/RPL. Perusahaan tidak melakukan pelaporan UKL atau UPL kepada instansi terkait sebagaimana yang dipersyaratkan.
HIJAU	
Aspek	Indikator
Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melakukan kegiatan swapantai air limbah dan melaporkan hasil swapantau air limbah kepada instansi terkait (paling tidak 20 data swa-pantau per bulan). IPAL yang ada terawat dan

	<p>berfungsi dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Konsentrasi air limbah yang dihasilkan <50% BMAL (izin). 4. Beban pencemaran yang dihasilkan < 50% BMAL (izin).
Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emisi udara <50 BME. 2. Peralatan pengendalian pencemaran udara terawat dengan baik.
Pencemaran Limbah B3	Perusahaan telah melakukan minimalisasi limbah B3 lebih dari 50% dari total limbah B3 yang dihasilkan.
Penggunaan Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan telah mempunyai sistem pengelolaan sumber daya yang baik. 2. Perusahaan telah melakukan <i>housekeeping</i> dengan baik. 3. Perusahaan telah melakukan penggunaan konservasi energi dengan efisien. 4. Perusahaan telah melakukan penggunaan konservasi air dengan baik. 5. Penggunaan bahan baku yang efisien.
Sistem Manajemen Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mempunyai komitmen dan kebijakan lingkungan yang kuat. 2. Perusahaan mempunyai organisasi pengelolaan lingkungan yang layak untuk mencapai target dan objektif pengelolaan lingkungan yang ada. 3. Perusahaan mempunyai STD (sistem tanggap darurat) yang baik.
Partisipasi dari Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mempunyai organisasi yang bertanggungjawab dalam kegiatan pengembangan dan partisipasi masyarakat. 2. Perusahaan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan disekitar lokasi kegiatan perusahaan. 3. Perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan. 4. Perusahaan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung.

EMAS	
Aspek	Indikator
Pencemaran Air	1. Konsentrasi air limbah yang dihasilkan < 5% dari BMAL (izin). 2. Beban pencemaran air limbahn < 5% BMAL (izin).
Pencemaran Udara	Emisis udara < 5% Baku Mutu Emisi Udara.
Pengelolaan Limbah B3	Perusahaan telah melakukan upaya minimalisasi limbah B3 lebih dari 95% dari total limbah B3 yang dihasilkan.
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Perusahaan telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.

Sumber: www.menlh.go.id

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat aspek dan indiaktor dari masing-masing peringkat sesuai dengan penilain peringkat kinerja lingkungan menurut PROPER.

2.3.2 Strategi Pelaksanaan PROPER

Strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan PROPER antara lain, sebagai berikut (Menteri Lingkungan Hidup, 2013):

- 1) Paket informasi PROPER yang disampaikan harus dapat dengan mudah dimengerti oleh para stakeholder. Untuk memudahkan langkah-langkah proaktif para stakeholder maka peringkat kinerja penataan perusahaan dalam PROPER dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat warna, yaitu:

- a. Peringkat Emas

Usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil dilakukan perusahaan dalam melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan hidup atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan.

b. Peringkat Hijau

Usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dalam melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Peringkat Biru

Usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dalam melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Peringkat Merah

Usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dalam melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Peringkat Hitam

Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan hidup sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Tabel 2.5
Peringkat Warna PROPER

Tingkat Petaatan	Peringkat		Efek Publikasi yang diharapkan
Lebih dari Taat	5	Emas	Insentif Reputasi Penghargaan Stakeholder
	4	Hijau	
Taat	3	Biru	
Belum Taat	2	Merah	Disinsentif Reputasi Tekanan Stakeholder
	1	Hitam	

Sumber: Situs Kementerian Lingkungan Hidup

- 2) PROPER harus dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan kredibel dimata para *stakeholder*. Untuk itu pelaksanaan PROPER dilakukan melalui pelibatan multi *stakeholder*.
- 3) PROPER perlu diarahkan kepada perusahaan yang peduli terhadap reputasi atau citranya dimata para *stakeholdernya*.
- 4) Pelaksanaan PROPER harus dilakukan secara bersama-sama dengan instrumen petaatan lainnya, seperti instrumen ekonomi dan instrumen penegakan hukum.
- 5) Pelaksanaan PROPER ke depan harus melibatkan jumlah perusahaan yang lebih banyak sehingga dapat mencerminkan tingkat petaatan perusahaan

secara keseluruhan, dan tercapainya konsistensi serta berkeadilan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.

- 6) Meningkatkan peran aktif Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota agar pelaksanaan PROPER dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun landasan yang digunakan dalam pelaksanaan PROPER, yaitu:
- a. Pengawasan penataan dalam pengelolaan lingkungan hidup: UU No. 23/1997 pasal 22 (1).
 - b. Hak atas informasi lingkungan hidup: UU No. 23/1997 pasal 5 (2).
 - c. Hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup: UU No. 23/1997 pasal 5 (3) dan UU No. 23.1997 7 (1).
 - d. Kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi: UU No. 23/1997 pasal 5 (2).

2.3.3 Tujuan dan Sasaran PROPER

PROPER adalah penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan yang memerlukan indikator yang terukur. Hal inilah yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan peran perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya:

1. Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan komitmen para *stakeholder* dalam upaya pelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.

5. Meningkatkan penataan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat.
6. Mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan

Adapun sasaran dari pelaksanaan PROPER antara lain, sebagai berikut:

1. Mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui instrument insentif dan disinsentif reputasi;
2. Mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

2.3.4 Keuntungan PROPER Bagi Para Stakeholder

Pelaksanaan PROPER dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan *stakeholder*. Mulai dari tahapan penyusunan kriteria penilaian PROPER, pemilihan perusahaan, penentuan peringkat sampai pada pengumuman peringkat kinerja kepada publik. Adapun dari pelaksanaan PROPER ini dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan dan para *stakeholder* lainnya, antara lain:

1. Sebagai instrument *benchmarking* bagi perusahaan untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja terhadap kinerja perusahaan lainnya secara nasional (*non financial benchmarking*);
2. Sebagai media untuk mengetahui status ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sebagai salah satu *clearing house* bagi investor, perbankan, masyarakat, dan LSM sekitar perusahaan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan;
4. Sebagai alat promosi bagi perusahaan yang berwawasan lingkungan terutama untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam perdagangan;
5. Sebagai bahan informasi bagi pemasok teknologi lingkungan terutama berkaitan teknologi ramah lingkungan yang dibutuhkan oleh perusahaan;

6. Meningkatkan citra dan kepercayaan perusahaan di mata para stakeholder untuk terlibat secara langsung dalam upaya pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan.
7. Memberikan ruang partisipatif bagi para *stakeholder* untuk terlibat secara langsung dalam upaya pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat PROPER bagi *stakeholder* yaitu dapat mendorong peran aktif para *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan, dan meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi antara para *stakeholder* dan meningkatnya nilai tambah bagi perusahaan yang melakukan pengelolaan yang lebih baik.

2.4 Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Hendriksen (1992) kata pengungkapan atau *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha.

Adapun menurut Ghozali dan Chariri (2007) pengungkapan atau *disclosure* berarti pemberian informasi mengenai aktivitas suatu perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi penggunaan laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, informasi tersebut harus relevan, dapat diandalkan dan menggambarkan secara tepat peristiwa ekonomi yang mempengaruhi hasil aktivitas perusahaan.

2.4.1 Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai keuntungan berbeda-beda (Suwardjono, 2005): “(1) Tujuan melindungi, (2) Tujuan informatif, dan (3) Tujuan kebutuhan khusus”. Berikut ini penjelasan dari kutipan diatas:

1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau BAPEPAM.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir menuntut pengungkapan secara rinci.

Tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Agar hal tersebut dapat dicapai diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang relevan. Pelaporan keuangan mencakup semua informasi yang dapat disediakan manajemen (Suwardjono, 2005), yaitu:

1. Statement keuangan.
2. Catatan atas statemen keuangan.
3. Informasi pelengkap.
4. Sarana pelaporan keuangan lain.
5. Informasi lain.

Berpegang pada peraturan atau regulasi primer yaitu surat keputusan ketua BAPEPAM No.38/PM/1996, terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan, yakni: “(1) *Mandatory disclosure*, dan (2) *Voluntary disclosure*”. Berikut penjelasan dari kedua pengungkapan laporan tahunan perusahaan:

1. *Mandatory disclosure*

Dalam UU NO. 8/PM/1995 *mandatory disclosure* yaitu pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah. Bagi emiten setelah *go public* pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib setelah *go public* dapat terjadi selama perusahaan masih merupakan perseroan terbuka.

2. *Voluntary disclosure*

Voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Menurut Herwidayatmo (2000) terdapat empat kerangka dasar penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan bermanfaat bagi para pemakainya yakni:

“1. Dapat dipahami (*understandability*), 2. Relevan (*relevance*), 3. Dapat diandalkan (*reliability*) dan 4. Dapat diperbandingkan (*comparability*).

Dapat dipahami berarti bahwa laporan keuangan tersebut harus mudah dipahami oleh pengguna. Relevan berarti laporan keuangan harus mampu memenuhi kebutuhan pemakai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dapat diandalkan berarti laporan keuangan harus menyajikan secara akurat informasi-informasi keuangan yang tercantum didalamnya. Dapat dipertimbangkan, berarti laporan keuangan harus dapat diperbandingkan baik perbandingan antara periode maupun antara perusahaan (Ikhsan, 2008:132).

2.4.2 Konsep Pengungkapan

Perusahaan harus memperhatikan pengungkapan yang dilakukannya karena hal itu berpengaruh terhadap hubungan jangka panjang perusahaan dengan para pengguna laporan keuangan. Perusahaan harus mengetahui pula bagaimana seharusnya pengungkapan dilakukan di dalam laporan keuangan, atau harus memahami konsep-konsep pengungkapan yang ada. Konsep umum pengungkapan menurut Hendriksen (2000:12):

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate*), yaitu pengungkapan yang minimal cukup untuk membuat laporan tidak menyesatkan.
2. Pengungkapan yang wajar (*fair*), yaitu pengungkapan yang memberikan perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial.
3. Pengungkapan yang lengkap (*full*), yaitu penyajian semua informasi yang relevan.

Pengungkapan secara konsep menurut Ermay (2008) merupakan: “Bagian dari kesatuan pelaporan keuangan, yang teknis merupakan tahap akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *financial statement*”. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan menjalankan fungsi pasar modal sebagai sumber pendanaan, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan, sehingga apabila ada hal-hal yang tidak diungkapkan oleh perusahaan, pertimbangannya adalah karena informasi tersebut dianggap tidak memiliki keterkaitan atau telah tersedia dalam sumber informasi lain (Sudaryanto, 2011).

2.4.3 Pengungkapan Lingkungan

Menurut Suratno dkk, (2007) pengungkapan lingkungan adalah: “Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan”. Sedangkan menurut Suhardjanto dan Miranti (2009) Pengungkapan lingkungan merupakan: “Wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan dimana masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya”.

Seperti yang dikutip dalam situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup (www.menlh.go.id) bahwa:

Pengungkapan lingkungan adalah sebuah istilah yang biasanya digunakan oleh suatu inisituasi atau organisasi untuk mengungkapkan data yang berhubungan dengan lingkungan, disahkan (diaudit) atau tidak, mengenai risiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan, strategi, target, biaya, pertanggungjawaban atau kinerja lingkungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi dengan tujuan meningkatkan nilai hubungan dengan institusi atau organisasi yang memberi laporan melalui laporan tahunan, *a stand-alone corporate environmental statement* (pernyataan mengenai pengelolaan lingkungan) atau dalam bentuk *newsletter*, video, CD-ROOM, dan *website*).

Pengungkapan lingkungan merupakan jenis pengungkapan sukarela.

Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) adalah penyajian informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno, 2006:8). Pengungkapan data akuntansi lingkungan biasanya meliputi hal sebagai berikut (Arifin, 2008): “1. Proses dari hasil kegiatan konservasi lingkungan; 2.

Item-item yang membentuk dasar akuntansi lingkungan; dan 3. Hasil yang dikumpulkan dari akuntansi lingkungan”.

Teoh et al. (1998) mengungkapkan 8 item tema pengungkapan lingkungan yang terbagi dalam 4 kategori sebagai berikut:

1. *Environmental Expenditure*
 - a. Pengeluaran saat ini dan masa lalu
 - b. Perkiraan pengeluaran masa mendatang
2. Pengurangan polusi
 - a. Instalasi/sistem penanggulangan polusi
 - b. Pengendalian polusi (sesuai standar lingkungan)
3. Pelestarian lingkungan
 - a. Konservasi sumber daya alam
 - b. Daur ulang
4. Informasi lainnya
 - a. Pelestarian perusahaan terhadap masalah lingkungan
 - b. Penghargaan untuk pelestarian lingkungan

Nicholas (2000) dalam Miranti (2009) menjelaskan mengenai pengungkapan lingkungan berdasarkan EPA (*Environmental Protection Agency's*). EPA merupakan suatu badan pemeliharaan lingkungan di Amerika Serikat EPA beragumen bahwa:

1. Pengungkapan lingkungan menghasilkan hukum dan pelanggaran dari hukum lingkungan dan mengantarkan penyelidikan publik.
2. Pengungkapan lingkungan menjadi insentif perusahaan untuk memenuhi kewajiban secara cepat.
3. Pengungkapan informasi kinerja lingkungan membantu perusahaan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik kedepannya.
4. Pengungkapan lingkungan secara periodik mengenai kesadaran isu-isu lingkungan dalam manajemen perusahaan.
5. Pengungkapan informasi lingkungan memfasilitasi fungsi efisien dari *capital market* untuk kinerja lingkungan perusahaan.

2.4.4 *Global Reporting Initiative (GRI)*

Global Reporting Initiative didirikan di Boston pada tahun 1997 oleh organisasi *non-profit* Amerika Serikat, *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES), dan *Tellus Institute*. GRI memperkasai dan mengembangkan *Sustainability Reporting Framework* yang berlaku di seluruh dunia, yang memungkinkan organisasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Dengan mengikuti *framework* yang dikembangkan GRI, organisasi dinilai lebih transparan mengenai hal ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelolanya sehingga dapat membangun kepercayaan *stakeholder* dan keuntungan lainnya.

GRI sendiri adalah adopsi dari *The UN Environment Programme* (penyandang dana dari *UN Development Fund*) yang saat ini telah menjadi organisasi independen. GRI dibangun di atas dasar pemikiran yang sederhana. GRI menawarkan mekanisme persetujuan pihak ketiga, yakni proses pencapaian tujuan melalui negosiasi diantara mitra kerja, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan sosial dan standar lingkungan. Tujuan GRI adalah untuk membangun para investor, pemerintah, perusahaan dan masyarakat umum untuk memahami lebih jelas mengenai proses peningkatan dalam pencapaian keberlanjutan (*sustainability*).

2.4.4.1 Standar Pengungkapan GRI

Hal ini membahas mengenai apa saja yang akan disertakan dalam laporan keberlanjutan, atau mengidentifikasi informasi yang relevan dan material bagi organisasi dalam laporan. Berikut terdapat tiga jenis standar pengungkapan GRI adalah:

- a. *Strategy and Profile*; pengungkapan yang secara keseluruhan bertujuan untuk mengenalkan perusahaan, seperti dari strategi, profil, maupun tata kelolanya.
- b. *Management approach*; pengungkapan yang memunculkan suatu topik sehingga pemahaman organisasi tersebut menjadi lebih spesifik.
- c. *Performance indicator*; indikator yang memunculkan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan yang dapat diperbandingkan.

2.4.4.2 Indikator Pengungkapan Lingkungan GRI

Pengungkapan lingkungan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator pengungkapan lingkungan pada *Global Reporting Initiative* (GRI). Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Pengungkapan Lingkungan GRI

Material	
EN 1	Material yang digunakan dari klasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.

EN 2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.
Energi	
EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.
EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama dan secara tidak langsung.
EN 5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konserfasi yang lebih baik.
EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber gaya terbaru serta pengurangan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.
EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
Air	
EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya.
EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air.
EN 10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
Keanekaragaman Hayati	
EN 11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, di kelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi.
EN 12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.
EN 13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali.
EN 14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.
EN 15	Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan.
Emisi, Effluensi, dan Limbah	

EN 16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.
EN 17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.
EN 18	Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
EN 19	Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.
EN 20	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.
EN 21	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
EN 22	Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah.
EN 24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimport, diekspor, atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapalkan secara internasional.
EN 25	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dari nilai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan.
Produk dan Jasa	
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.
EN 27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori.
Kesesuaian	
EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
Transport	
EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain, dan materi yang digunakan perusahaan

	dalam operasinya mengirim para pegawai.
Keselarasan	
EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.

Sumber: www.globalreporting.org

2.5 Kinerja Keuangan

2.5.1 Definisi Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2). Seperti halnya membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.

Kinerja keuangan menurut Sucipto (2003) adalah: “Penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba”. Sedangkan menurut IAI (2007) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Menurut Jumingan (2006:239) bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah usaha dan gambaran yang telah dilakukan perusahaan dengan mengukur keberhasilan untuk menghasilkan laba secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

2.5.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan memenuhi standar perilaku yang telah diterapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Sedangkan Jumingan (2009:239) menyatakan bahwa tujuan kinerja keuangan adalah untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan, serta kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, pengukuran kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Menurut Mulyadi (2001:312), penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasi karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Dengan melakukan penilaian kinerja keuangan, maka berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.

2.5.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Dengan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu, pengguna laporan dapat memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang menarik perhatian pengguna laporan, seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo (Ikatan Akuntan Indonesia dalam Emay, 2008).

Menurut Meriewaty dan Setyani (2005) salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian prestasi dan kondisi keuangan perusahaan adalah rasio-rasio keuangan untuk periode tertentu. Rasio-rasio keuangan tersebut merupakan indikator keuangan yang dapat mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu.

Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur *financial health* (kesehatan perusahaan). Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subyektif yang menggambarkan efektifitas

penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utamanya dan meningkatkan pendapatan.

Terdapat empat kategori pengukuran kinerja keuangan menurut Sarumpaet (2005:92) yaitu:

1. *Earning measures: earning per share/EPS, return on investment (ROI), Return on Assets (RONA), return on capital employment (ROCE), return on equity (ROE), maupun perhitungan return yang lain.*
2. *Cash flow measures: free cash flow, cash flow return on gross investment (ROGI), cash flow return on investment (CFROI), total shareholder return (TSR), dan total bussines return (TBR)*
3. *Value measures: economic value added (EVA), market value added (MVA), cash value added (CVA), dan shareholder (SHV).*

Rasio-rasio keuangan banyak digunakan dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan selama periode tertentu. Menurut Kieso, et. al (2011: 221-222) terdapat empat tipe pokok rasio yang digunakan dalam menganalisa kinerja perusahaan, yaitu: “1. *Liquidity ratio*; 2. *Activity ratio*; 3. *Profitability ratio*; dan 4. *Converage ratio*”. Berikut penjelasan dari empat tipe pokok rasio dari kutipan diatas:

1. *Liquidity Ratio*: atau biasa disebut rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam kewajiban jangka pendek. Termasuk dalam rasio ini adalah *current ratio*, *quick/acid test ratio*, dan *current cash debt coverage ratio*.
2. *Activity Ratios*; yang mengukur efektivitas penggunaan aset oleh perusahaan. Termasuk dalam rasio ini adalah *receivables turnover*, *inventory turnover*, dan *asset turnover*.

3. *Profitability Ratios*; rasio yang mengukur derajat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan (atau divisi) dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam rasio ini adalah *profit margin in sales, rate of return on asset, rate of return on share capital-ordinary, earnings per share, price/earnings ratio*, dan *payout ratio*.
4. *Coverage Ratios*; rasio yang mengukur derajat keyakinan terhadap investor dan kreditor jangka panjang. Termasuk dalam rasio ini adalah *debt to total assets, times interest earned, cash debt coverage ratio, book value per share*, dan *free cash flow*.

2.5.4 Rasio-Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, Hanafi dan Abdul Halim (200:69) menyatakan bahwa rasio-rasio keuangan dikelompokkan ke dalam lima macam kategori yaitu: “1. Rasio Likuiditas, 2. Rasio Aktivitas, 3. Rasio Solvabilitas, 4. Rasio Profitabilitas, dan 5. Rasio Pasar.”

Berikut adalah penjelasan dari kutipan di atas:

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.

2. Rasio Aktivitas

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Ada empat rasio aktivitas diantaranya:

1. Rata-rata umur piutang
 2. Perputaran persediaan
 3. Perputaran aktiva tetap
 4. Perputaran total aktiva
3. Rasio Solvabilitas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak *solvable* adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan memfokuskan pada sisi kanan neraca.

4. Rasio Profitabilitas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu.

Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu:

1. Profit Margin;
2. Return On Asset (ROA)
3. Return On Equity (ROE)

5. Rasio Pasar

Rasio pasar adalah rasio yang mengukur harga pasar yang *relative* terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut investor (atau calon investor) meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio ini.

Adapun menurut Brealey, Myres & Marcus (2008:72) terdapat empat jenis rasio keuangan antara lain:

1. Rasio Leverage (*Leverage ratio*), memperlihatkan seberapa berat utang perusahaan.
2. Rasio Likuiditas (*Liquidty Ratio*) mengukur seberapa mudah perusahaan dapat memegang kas.
3. Rasio Efisiensi (*Efficiency ratio*) atau tingkat perputaran (*turnover ratio*) mengukur seberapa produktif perusahaan menggunakan aset-asetnya.
4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio profitabilitas yaitu berdasarkan *Return On Assets* (ROA) karena penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan perusahaan pertambangan dalam menghasilkan laba berdasarkan pada peringkat kinerja lingkungan yang diperoleh dan pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

2.5.5 Rasio Profitabilitas

Menurut Van Horne and Wachowicz (2005:145) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut: “*Profitability ratios is ratios that relate profit to sales and investment*”

Hanafi (2009:83) mengemukakan bahwa: “Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu”.

Menurut Mulyadi (2007:73) profitabilitas adalah: “Hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen”. Sedangkan menurut Fahmi (2011:68) rasio profitabilitas yaitu: “Mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik perusahaan menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”

Menurut Gray *et.al*, (1995) profitabilitas adalah: “Faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada para pemegang saham. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial”.

Brigham & Houston (2006) menjelaskan bahwa: “Profitabilitas adalah hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh

perusahaan, dimana rasio ini digunakan sebagai alat pengukur atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan”.

Blocher (2002:200) mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya kualitas pada suatu produk yang dihasilkan perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dan meningkatkan tingkat profitabilitas yang tinggi.

Dari beberapa pengertian rasio profitabilitas diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

2.5.6 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Terdapat banyak ukuran profitabilitas, masing-masing pengembalian perusahaan dihubungkan terhadap penjualan, aktiva, modal, atau nilai saham. Menurut Bridgham (2007:112) jenis-jenis profitabilitas terdiri dari: “*Profit Margin Sales, Return on Total Assets (ROA), Basic Earning Power (BEP) ratio, dan Return on Equity (ROE)*”. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing rasio profitabilitas tersebut:

- a. *Profit Margin Sales*, rasio yang menggambarkan pendapatan bersih dari setiap penjualan, dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan bersih dengan penjualan.
- b. *Return on Total Assets (ROA)*, rasio yang diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan jumlah aktiva.

- c. *Basic Earning Power (BEP) ratio*, rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan sebelum Bunga dan pajak dengan jumlah aktiva.
- d. *Return on Common Equity (ROE)*, Rasio dari pendapatan bersih dibagi dengan modal, menggambarkan tentang tingkat pengembalian dari investasi para pemegang saham

Adapun beberapa jenis rasio profitabilitas menurut Hanafi (2009:83) secara umum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: “1. *Return on Total Assets (ROA)*; 2. *Return on Equity (ROE)*; dan 3. *Net Profit Margin (NPM)*”.

Dari beberapa jenis rasio profitabilitas, analisis rasio profitabilitas dalam penelitian ini hanya menggunakan *Return On Assets (ROA)* sebagai pengukuran kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan.

2.5.7 *Return on Assets (ROA)*

Pengertian ROA menurut Munawir (2004:91) adalah: “*Return on Assets* adalah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan”.

Adapun menurut Anthony dan Govindarajan (2002:345) *Return On Assets* adalah:

Rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan

memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva oleh perusahaan untuk beroperasi sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi.

Sementara Hanafi (2009:159) menjelaskan bahwa analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:145) *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut: “Hasil Atas Total Aset (HAA) adalah ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:145) *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Hasil Atas Total Aset (HAA)}}{\text{Total Aset}}$$

(Sundjaja dan Barlian, 2003:145)

Jadi dapat disimpulkan bahwa ROA adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aktiva perusahaan.

2.5.8 Komponen – Komponen *Return On Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) dipecah ke dalam dua komponen, yaitu: "*Profit margin* dan perputaran total aktiva (aset)". Pemecahan (disagregasi) ini bisa menghasilkan analisis yang lebih tajam lagi (Hanafi, 2009:161):

1. *Profit margin* melaporkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan.
2. Perputaran total aset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva (aset) perusahaan.

2.5.9 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008:197), tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Adapun Anthony dan Govindarajan (2002:349) mengungkapkan indikator profitabilitas berdasarkan ROA mempunyai keunggulan, yaitu:

1. Merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada.
2. Mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
3. Merupakan dominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Jadi dari manfaat dan keunggulan tersebut dapat dijadikan kesimpulan bahwa rasio profitabilitas berdasarkan ROA dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, karena rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik kinerja perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap kinerja keuangan. Penelitian-penelitian tersebut yang dijadikan sebagai sumber referensi dan perbandingan dalam penelitian.

Tabel 2.7
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Kesimpulan
1	Pengaruh <i>Environmental Performance</i> dan <i>Environmental Disclosure</i> terhadap	Luciana S. A. dan Dwi Wijayanto, STIE Perbanas Surabaya (dalam	Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan pertambangan umum pemegang

	<i>Economic Performance</i>	<i>Proceedings The 1st Accounting Conference, Depok 2007)</i>	HPH/HPHTI, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> , <i>unexpected earning</i> , <i>pre-disclosure environment</i> , <i>growth opportunities</i> , dan <i>profit margin</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>economic performance</i> , namun <i>environmental disclosure</i> berpengaruh terhadap <i>economic performance</i> .
2	<i>The Relationship Between Environmental Performance and Financial Performance of Indonesian Company</i>	Susi Sarumpaet, Universitas Lampung, 2005 (dalam jurnal Akuntansi & Keuangan vol 7 no. 2, November 2005: 89-98).	Berdasarkan penelitian ini, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa <i>rating PROPER</i> cukup terpercaya sebagai ukuran kinerja lingkungan karena kesesuaiannya dengan standar internasional

			ISO 14001.
3	Hubungan antara kinerja lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia	Lindrianasari, 2007 (dalam JAAI, Vol. 11, No. 2, 159-172).	Hasil pengujian hipotesis pertama terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja lingkungan dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan tidak terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja ekonomi dengan kinerja lingkungan. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan tidak terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja ekonomi dengan kualitas pengungkapan lingkungan
4	<i>The Relations Among Environmental Disclosure, Environmental</i>	Sulaiman A. Al-Tuwaijri, Christensen, Theodore E.,	Hasil pengujian hipotesis pertama bahwa <i>environmental performance</i>

	<i>Performance, and Economic Performance: A Simultaneous Equations.</i>	Hughes II, K. E. 2003 (<i>Approach, Accounting, Organizations and Society</i> , 29, 447-471).	berpengaruh terhadap <i>economic performance</i> . Hasil Pengujian hipotesis kedua menunjukkan <i>environmental performance</i> berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . Hasil pengujian hipotesis ketiga <i>environmental disclosure</i> berpengaruh terhadap <i>economic performance</i> .
5	Pengaruh <i>Environmental Performance</i> dan <i>Environmental Disclosure</i> Terhadap <i>Economic Performance</i>	Eiffeliena Nuraini F, Universitas Diponegoro, 2010	Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>economic performance</i> . Hasil penelitian hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa <i>environmental disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>economic performance</i> .

6	<i>Revisiting The Relation Between Environmental Performance and Environmental Disclosure: an Empirical Analysis</i>	Peter M. Clarkson, Yue Li, Gordon D. Richardson, Florin P. Vasvari. 2007. (Article in <i>Press-Accounting, Organization, and Society</i>)	Dalam penelitian ini menemukan hubungan positif antara kinerja lingkungan dan tingkat pengungkapan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih peduli terhadap lingkungan dan berkinerja lingkungan baik maka akan mengungkapkan informasi mengenai tanggungjawab lingkungannya secara lebih luas.
7	Pengaruh <i>Environmental Performance</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i> dan <i>Economic Performance</i>	Ignatius Bondan Suratno, Darsono, Siti Mutmainah, 2006	Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara <i>environmental performance</i> terhadap <i>environmental disclosure</i> dan <i>environmental performance</i> terhadap <i>economic performance</i>

Sumber: Dari berbagai jurnal.

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Suratno, dkk (2006) kinerja lingkungan adalah: “Kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*go green*)”. Adapun Ikhsan (2008:41) mengungkapkan bahwa kinerja lingkungan adalah “Aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan terkait langsung dengan lingkungan alam disekitarnya”. Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan melalui hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut PROPER dengan menilai upaya perusahaan dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan atas pencemaran lingkungan.

Pengungkapan lingkungan menurut Suratno, dkk (2006) adalah: “Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan atau laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan”. Sedangkan menurut Suhardjanto dan Miranti (2009) pengungkapan lingkungan adalah: “Wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan dimana masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya”.

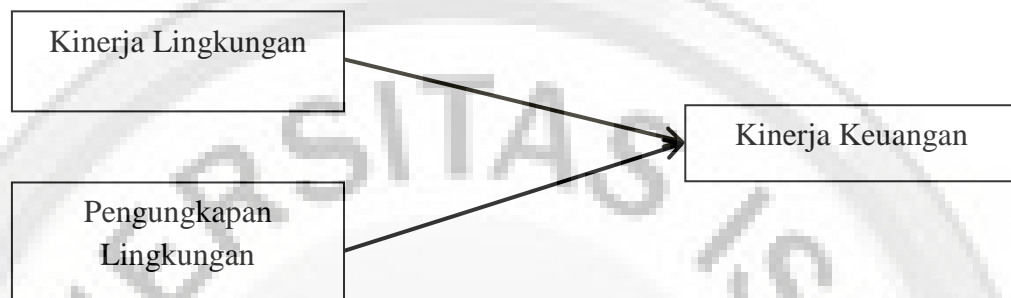
Menurut Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah: “Suatu organisasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Rasio profitabilitas adalah rasio keuntungan yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan” (Sutrisno,

2007:215). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset*". Menurut Munawir (2004:91) ROA adalah: "Salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan".

Christman (2000) dalam Gonzales dan Benito (2005) mengungkapkan semakin tinggi inisiatif perusahaan dalam kepemilikan teknologi untuk penanganan polusi, maka semakin besar pula *cost advantage* yang dihasilkan. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki niat yang baik dalam penanganan permasalahan lingkungan dari hal-hal yang berkaitan lainnya, perusahaan tersebut akan terhindar dari potensi kerugian yang disebabkan dari timbulnya masalah tersebut sehingga dapat membuat kinerja keuangannya lebih baik.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suratno, dkk (2006) dimana penelitian tersebut terdapat hubungan positif dan signifikan antara *environmental performance* terhadap *environmental disclosure* dan *environmental performance* terhadap *economic performance*. Menurut Suratno, dkk (2006) bagi perusahaan-perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah atau pencemaran lingkungan dalam melakukan peningkatan *environmental disclosure*-nya harus terlebih dahulu meningkatkan *environmental performance*-nya. Klassen dan Whybark (1999) dalam Gonzalez dan Benito (2005) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pencegahan terhadap masalah dan dampak lingkungan akan menghasilkan kinerja operasional yang lebih baik dan mengarahkan kepada kinerja keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan pada kajian pustaka diatas dan dari berbagai sumber penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara (Hasan, 2002). Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang dikemukakan diatas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H2: Pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan